

BAB I

P E N D A H U L U A N.

1. Latar Belakang Masalah.

Dasar-dasar yang ikut mendukung keberadaan dan perkembangan koperasi di Indonesia sudah cukup kuat dan memadai baik bila dilihat dari segi hukum, kemauan politik, budaya, maupun kesejarahan.

1.1. Secara hukum, keberadaan koperasi Indonesia telah sangat kokoh karena telah terjamin oleh ketentuan hukum dasar kita dan aturan-aturan pelaksanaannya. Hukum dasar kita menyatakan : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" (Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1) yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang se orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi".

Untuk melaksanakan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut telah dikeluarkan beberapa Undang-undang Koperasi Indonesia, dan yang terpenting : Undang-undang No. 79 tahun 1958, Undang-undang No.14 tahun 1965 dan Undang-undang No.12 tahun 1967. Karena sekitar 80% warga negara kita ada di pedesaan, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus koperasi pedesaan berupa Instruksi Presiden

No.4 tahun 1973, Instruksi Presiden No.2 tahun 1978 dan Instruksi Presiden No.4 tahun 1984. Disamping itu oleh Departemen Koperasi telah dikeluarkan berbagai peraturan lain yang berfungsi untuk mendukung, memperkuat atau melancarkan pelaksanaan dari peraturan-peraturan hukum tersebut.

1.2) Kemauan politik rakyat dan Pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu jalur perekonomian bangsa dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat cukup meyakinkan pula. Rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan MPR telah menyatakan bahwa koperasi merupakan salah satu sarana vital untuk meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia (GBHN, 1978). Ketetapan MPR no: II/MPR/1983 pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Umum dalam bidang koperasi antara lain menyebutkan :

"Peranan dan usaha koperasi perlu ditingkatkan dan diperluas di berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan kelistrikan dan lain-lain. Pembinaan Koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah".

Untuk melaksanakan kemauan politik tersebut agar perkembangan koperasi Indonesia lebih pesat Pemerintah Orde Baru dengan tanpa ragu-ragu dan penuh rasa tanggung-jawab sejak Kabinet Pembangunan IV, yang diumumkan pada tanggal 16 Maret 1983 yaitu menjelang pelaksanaan PELITA IV telah

membentuk Departemen tersendiri yang bertugas membina dan mengembangkan koperasi yang disebut Departemen Koperasi dengan Bustanil Arifin SH. sebagai Menteri yang pertama. Kemauan politik Pemerintah untuk terus mengembangkan koperasi dapat disimak dari pidato Menteri Koperasi pada peringatan Hari Koperasi ke 36 pada tgl. 12 Juli 1983 :

"Pengembangan koperasi bukanlah selera Pemerintah, atau pun selera Presiden, tetapi merupakan amanat rakyat, amanat dari pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan dasar idiil Pancasila dan landasan konstitusionil Undang-undang Dasar 1945, serta amanat GBHN, karena itu mutlak harus kita laksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi". (PIP, Juli 1983 : 5)

1.3. Secara budayapun sistim koperasi itu dianggap sesuai dengan dasar budaya Indonesia yang berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan (Undang-Undang Koperasi No.12/67 pasal 5).

"Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia dan suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dan kekeluargaan serta Bhinneka Tunggal Ika."

(Penjelasan Undang-Undang Koperasi No.12/67 pasal 5).

Koencaraningrat mengatakan (1974 : 59) : "Konsep gotong-royong merupakan suatu konsep yang erat bersangkutan paut dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris." Tetapi kehidupan gotong-royong itu bukan monopoli masyarakat pedesaan saja, dengan pola dan intensitas yang berbeda jiwa gotong royong itu masih melekat pada setiap jiwa bangsa Indonesia termasuk yang ada

di daerah perkotaan. Frans Seda (Kompas, 1984) mengatakan: "Kekeluargaan adalah jiwa/geistung yang menjiwai koperasi sedangkan gotong royong merupakan bentuk atau pengorganisasian dari usaha bersama". Bagi kita sistim koperasi merupakan sistim usaha bersama modern yang dijiwai oleh asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

1.4. Bila "Bank Penolong dan Tabungan" yang didirikan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiriaatmadja pada tahun 1896 dianggap sebagai cikal bakal kelahiran koperasi Indonesia yang teratur maka berarti, kini (1985), koperasi Indonesia telah berumur 89 tahun atau mendekati satu abad, satu periode waktu yang cukup panjang. Menurut Metn. Kusumahadi (PIP, No.55, 1985 : 30) : "Membandingkan periode yang sama, di daratan Eropa dan Amerika dalam waktu satu abad koperasi di sana mampu meletakkan landasan yang begitu kokoh sehingga dapat menduduki posisi sama dengan bangun usaha yang lain dalam percaturan ekonomi nasional".

Berbeda dengan dasar-dasar berpijaknya yang begitu kuat, kenyataan di lapangan pada umumnya menunjukkan bahwa perkembangan koperasi Indonesia baik dalam arti statik (kuantitatif) maupun dalam arti dinamik (kualitatif) seperti dalam tingkat partisipasi anggotanya, tingkat pelayanannya dan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota tampaknya masih jauh dari harapan para pencinta koperasi.

M. Dawan Rahardjo menyatakan : "Sebagai wadah ekonomi rakyat dan wadah partisipasi masyarakat yang remuneratif, maka nampaknya keadaan koperasi dewasa ini masih jauh dari yang diharapkan". (Prisma, Juni 1981, : 10). Selanjutnya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo menambahkan :

"Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, koperasi dimaksud untuk menjalankan peranan penting dalam perekonomian Indonesia

Namun harus diakui kenyataan bahwa apa yang dikehendaki UUD 1945 belumlah terpenuhi" (Prisma, Juni 1981 : 11).

Drs. Haryo Suroso, Ka. Balitbang. Depdagkop juga menyatakan : "Keadaan koperasi dewasa ini masih jauh dari harapan sebab anggota-anggota koperasi masih belum mampu mengambil keputusan yang tepat dan menguntungkan sehingga usahanya selalu serasi dengan kebutuhan anggota". (PIP, No. 20/II, 1982). F.M. Amin Azis dengan penelitiannya menemukan bahwa : "Tingkat partisipasi anggota koperasi masih sangat rendah. Dari 20 koperasi kerajinan yang diteliti di DKI Jaya dan Jawa Barat hanya tiga koperasi yang telah membayar Simpanan Wajib lebih dari 60 % nya; enam buah koperasi antara 20% - 60%; tujuh buah yang kurang dari 20 % dan empat koperasi tak pernah membayar. Bila dilihat dari kehadirannya dalam rapat-rapat anggota : sepertiganya mengatakan bahwa kehadirannya itu karena diwajibkan oleh Pengurus dan sepertiganya lagi karena sekedar ingin mende ngarkan isi rapat". (M. Amin Azis dalam Sri Edi Swasono,

1983 : 263-264).

Meskipun demikian, harus diakui bahwa akhir - akhir ini yaitu selama PELITA III perkembangan koperasi Indonesia dalam arti jumlah cukup meyakinkan. Dalam angka-angka selama lima tahun itu (1978-1982). "Jumlah koperasi telah naik 1,3 kali; jumlah anggota naik 1,5 kali; volume usaha naik 12,3 kali; tabungan koperasi naik 4,6 kali dan perm_odalan koperasi naik 6,4 kali". (PIP, Juli, 1983 : 6).

Keadaan koperasi Indonesia pada tahun 1982 (setelah ada peningkatan-peningkatan) adalah sebagai berikut : "Jumlah koperasi/KUD : 23 327 buah; jumlah KUD : 5 911 buah ; jumlah anggota koperasi/KUD : 11 141 204 orang; jumlah tabungan koperasi : Rp. 90 599 juta dan jumlah volume usaha koperasi Rp. 2 093 279 juta." (PIP, Juli, 1983 : 6)

Atas dasar itu Menteri Koperasi pada Harkop ke 36 (12 Juli 1983) menyatakan bahwa selama PELITA III, koperasi Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan kuat bahkan telah tumbuh dengan melonjak dengan loncatan-loncatan besar. Tetapi Menteri juga menyadari bahwa perjalanan untuk membangun koperasi Indonesia itu masih panjang dan beliau mengatakan :

"Namun demikian kita sadari sepenuhnya , bahwa apa yang telah dicapai selama ini masih harus diikuti dengan hasil-hasil yang lebih besar lagi, misalnya : Kenaikan di dalam jumlah harus diikuti dengan peningkatan dalam kualitas atau mutunya. Peningkatan dalam jumlah koperasi dan volume usaha koperasi harus disertai dengan sumbangan dan peranan koperasi yang semakin besar dan semakin penting di dalam perekonomian nasional". (PIP, Juli, 1983 : 6).

Memperkuat pernyataannya pada tahun 1983, dalam RAT INKUD pada tahun 1984 Menteri mengatakan : "Koperasi/KUD dewasa ini baru bisa meningkatkan kuantitasnya, namun mutunya belum mencapai sasaran. Hal ini disebabkan belum di milikinya tenaga trampil yang professional". (PIP, No. 51, 1985 : 20).

Sesungguhnya secara kuantitatifpun perkembangan koperasi kita relatif belum menggembirakan. pada tahun 1982 dari ± 135 juta penduduk Indonesia, yang telah menjadi anggota koperasi baru 11 141 204 orang atau baru sekitar 8,25%. Harsono (1981) dalam penelitiannya pada 6 KUD di Jawa Timur menemukan bahwa baru 15,5% dari jumlah kepala keluarga di 3 KUD Model yang telah menjadi anggota koperasi dan pada 3 KUD non Model baru 7,3% saja. Menurut Prof. Ir. Soedarsono Hadisaputro, Ketua DEKOPIN (PIP, No. 51, 1985: 14): "Dari 2,7 juta pegawai negeri Indonesia diperkirakan baru sepertiganya yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri!" Sebagai perbandingan pada tahun 1977, prosentase petani yang menjadi anggota koperasi di Jepang, Taiwan dan Korea hampir mendekati 100% sedang di Sri Lanka 80% dan di Bangladesh 60% (Edgar Owens dan Robert Shaw, 1977 : 106). Sumbangan sektor koperasi terhadap pendapatan nasional juga masih sangat rendah. Prof. Dr. Mubyarto (Kompas, 23 Mei 1981) mengemukakan bahwa : " 86% kegiatan perekonomian Indonesia dikuasai oleh sektor swasta, 12% oleh sektor negara dan hanya 2% oleh sektor koperasi. "Dua tahun setelah

pernyataan Mubyarto, Kompas menyatakan : "Sumbangan kope-rasi terhadap GNP Indonesia baru sebesar 4%." (Kompas, 11 Juni 1983). Pesimisme kita terhadap bangun usaha berbentuk koperasi ini akan makin besar bila menyimak kerawanan-ke-rawanan lain yang terjadi dalam tubuh gerakan koperasi seperti adanya salah urus, salah kira dan korupsi oleh ok-num pengurus yang jumlahnya ratusan juta bahkan milyaran rupiah seperti yang terjadi di KOPTI Jawa Tengah atau han-curnya koperasi kebanggaan seperti GKBI atau jatuhnya se-buah koperasi teladan tingkat nasional dalam tempo kurang dari lima tahun seperti yang dialami oleh Koperasi Setia Budi Wanita Malang (SBMW). Kasus-kasus rontoknya koperasi yang memiliki nama besar itu dialami pula oleh koperasi -koperasi lainnya seperti KUD Sulahan di Bali, Kobutri Ban-dung, Puskopti Jakarta, Puskud dan BKP Jawa Barat (PIP, No. 55, 1985 : 5).

Lepas dari berbagai pesimisme tersebut, promovendus melihat suatu kenyataan lain yang sangat berbeda. Di Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Pangalengan wilayah Bandung Selatan terdapat sebuah koperasi pedesaan dalam jenis ko-perasi peternakan yang dinilai oleh berbagai pihak seba-gai koperasi yang sangat maju sehingga telah beberapa ka-li mendapat predikat sebagai koperasi teladan tingkat na-sional.

Data yang promovendus peroleh dari kantor Koperasi Ka

bupaten Bandung dan kantor KPBS, sejak didirikannya tahun 1969 hingga tahun 1984 memberikan gambaran perkembangan kuantitatif yang sangat besar, apakah dilihat dari segi perkembangan anggotanya, ternak milik anggota, produksi susu/tahun, perkembangan simpanan-simpanannya, usahanya maupun Sisa Hasil Usahanya. Perkembangan KPBS antara tahun 1969 hingga 1984 dapat dilihat pada Tabel 1-1 di bawah ini.

TABEL 1-1
PERKEMBANGAN KPBS ANTARA TAHUN 1969-1984.

| No | Jenis Perkembangan | Tahun 1969 | Tahun 1984 | % Perkemb. | %Rata2 /Thn. |
|----|--|------------|------------|-----------------|--------------|
| 1. | Anggota (orang) | 778 | 5 474 | 604 | 40 |
| 2. | Ternak (ekor) | 2 608 | 12 521 | 380 | 25 |
| 3. | Produksi (ribuan liter). | 1 360 | 19 122 | 1 306 | 87 |
| 4. | Simpanan Pokok (ribuan rupiah). | 114 | 13 105 | 11 396 | 760 |
| 5. | Simpanan Wajib (ribuan rupiah). | 305 | 170 665 | 55 855 | 13 724 |
| 6. | Simpanan Khusus / Saham MT (ribuan rupiah). (mulai 1979) | 23 686 | 686 044 | 2 796 | 186 |
| 7. | Volume Pembelian Susu dari anggota (Juta liter) | 31 | 5 235 | 16 787 | 11 119 |
| 8. | Sisa Hasil Usaha (ribuan rupiah). | 343 | 60 686 | 17 593 | 11 173 |
| | | | | Rata-rata : 889 | |

Sumber : Laporan Tahunan KPBS, tahun buku 1984.

Adanya perkembangan kuantitatif KPBS yang begitu me -
ngesankan itu menarik minat promovendus untuk menelitinya
lebih mendalam karena beberapa alasan :

- a. Ada apa sebenarnya di KPBS itu ? Faktor-faktor apa sa
ja yang mendukung perkembangannya itu ? Apakah karena
faktor-faktor intern atau karena faktor-faktor eks -
tern ?
- b. Bagaimana peran anggota sebagai pemilik KPBS dalam
mendukung kemajuan yang pesat tersebut ?
- c. Apakah para anggota KPBS memperoleh perkembangan yang
sejalan (proporsional) dengan perkembangan yang dica-
pai oleh KPBS selama itu ?

Terlepas dari kekuatan mana yang lebih berpengaruh
terhadap KPBS penelitian mendalam terhadap koperasi peter
nakan sapi perah itu dewasa ini tampaknya makin penting
pula, karena :

- 1). Penelitian mendalam yang terfokus pada segi anggota
nya dengan latar belakang peneliti sebagai pendidik
Ilmu Pengetahuan Sosial belum ada di tanah air ini.
- 2). Prestasi Bangsa Indonesia yang telah mampu swasembada
di bidang produksi beras sebagai makanan pokok (1985)
perlu ditingkatkan pada pengembangan produksi pangan
berprotein tinggi agar kualitas manusia Indonesia ba
ik secara fisik maupun psikis bisa ditingkatkan pula.
- 3). Dewasa ini sebgaiar besar kebutuhan susu Indonesia ma
sih diimpor. Pemerintah mentargetkan agar pada akhir

Pelita IV (1988) perbandingan pemakaian susu impor dan produksi dalam negeri menjadi 1 : 1. Pada saat itu diharapkan agar produksi susu dalam negeri bisa mencapai 603,9 ribu ton/tahun dengan sapi perah sebanyak 329 ribu ekor. Sebagai perbandingan pada tahun 1983 produksi susu dalam negeri baru sebanyak 144,6 ribu ton saja (Buletin koperasi, No. 2, 1985 : 21-26) Dari jumlah produksi sebanyak itu \pm 13 % merupakan hasil produksi KPBS Pangalengan. Agar target peningkatan produksi yang diharapkan oleh Pemerintah itu bisa tercapai kiranya perlu didukung oleh berbagai penelitian ilmiah dari berbagai disiplin keilmuan. Menurut perkiraan promovendus, kemungkinan bagi Bangsa Indonesia untuk swasembada dalam produksi susu perah adalah besar sekali karena berbagai sarana pendukungnya relatif tersedia seperti lingkungan alam yang mendukung, tenaga kerja murah, kemampuan dalam keterampilan produksi.

- 4). Pengembangan peternakan sapi perah rakyat dengan skala kecil itu yang melibatkan ribuan peternak kiranya hanya bisa diharapkan mencapai sasaran apabila para peternak itu bisa dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk koperasi. Melalui koperasi bantuan Pemerintah akan mudah disalurkan dan melalui koperasi pula pemasaran atas hasil-hasilnya juga relatif lebih mudah diupayakan (dalam hal ini produksi susu sapi).

Bahkan, melalui wadah koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial swadaya, para anggotanya secara bertahap dan berkesinambungan dapat dididik terus sehingga kemampuan teknis berternaknya, kemampuan serta kesadaran berorganisasinya dan kualitas dirinya sebagai warga negara bisa terus berkembang pula. Karena itu penelitian mendalam tentang koperasi peternakan kiranya amatlah penting.

5). Ditinjau dari segi pendidikan, pengembangan peternakan sapi perah melalui koperasi itu akan sangat penting pula, karena :

(a). Seperti telah dikemukakan pada nomor 4), melalui koperasi diharapkan akan berlangsung pendidikan anggota sepanjang **hayat** (sepanjang ia menjadi anggota koperasi) dalam berbagai dimensinya sejak pendidikan teknis peternakan, organisasi, manajemen, lingkungan hidup, keluarga berencana sampai pada pendidikan berdemokrasi. Melalui koperasi (bila sudah berkembang) juga diharapkan terjadi mekanisme pendidikan anggota dari dalam yang bersifat otomatis dan self-help sehingga dengan demikian koperasi akan berperan membantu pemerintah dalam mendidik dan membangun kualitas bangsa. Atas dasar itu maka wadah koperasi bukan sekedar organisasi ekonomi semata-mata atau organisasi ekonomi yang berwatak sosial tapi juga akan merupakan wahana pembangunan masyarakat menuju kearah

perubahan sosial seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

(b). Pengaruh lebih lanjut dari pengembangan koperasi peternakan ini adalah pada pengembangan ilmu yaitu ilmu peternakan khususnya dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung. Dengan berkembangnya koperasi peternakan permintaan terhadap tenaga-tenaga peternakan sejak tenaga-tenaga kasar, tenaga teknis hingga tenaga-tenaga ahlinya akan meningkat, yang selanjutnya perlu diikuti oleh pengembangan sekolah-sekolah peternakan sejak tingkat sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi. Secara umum bisa dinyatakan bahwa melalui pengembangan koperasi peternakan secara kumulatif akan mendorong ke arah peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan ilmu.

Betapa besarnya pengaruh faktor pendidikan dan gizi dalam pembangunan suatu bangsa, dengan bagus sekali digambarkan dalam suatu paradigma oleh Michael P. Todaro pada bukunya *Economic Development in the Third World* (1978 : 64-67). Dalam paradigma itu (lihat gambar 1) Todaro menunjukkan bahwa produktivitas suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor gizi/kesehatan bangsa tersebut. Secara berangkai dan sirkuler tingkat produktivitas tertentu akan mempengaruhi pendapatan atau pertumbuhan ekonominya dan selanjutnya akan mempengaruhi inves-

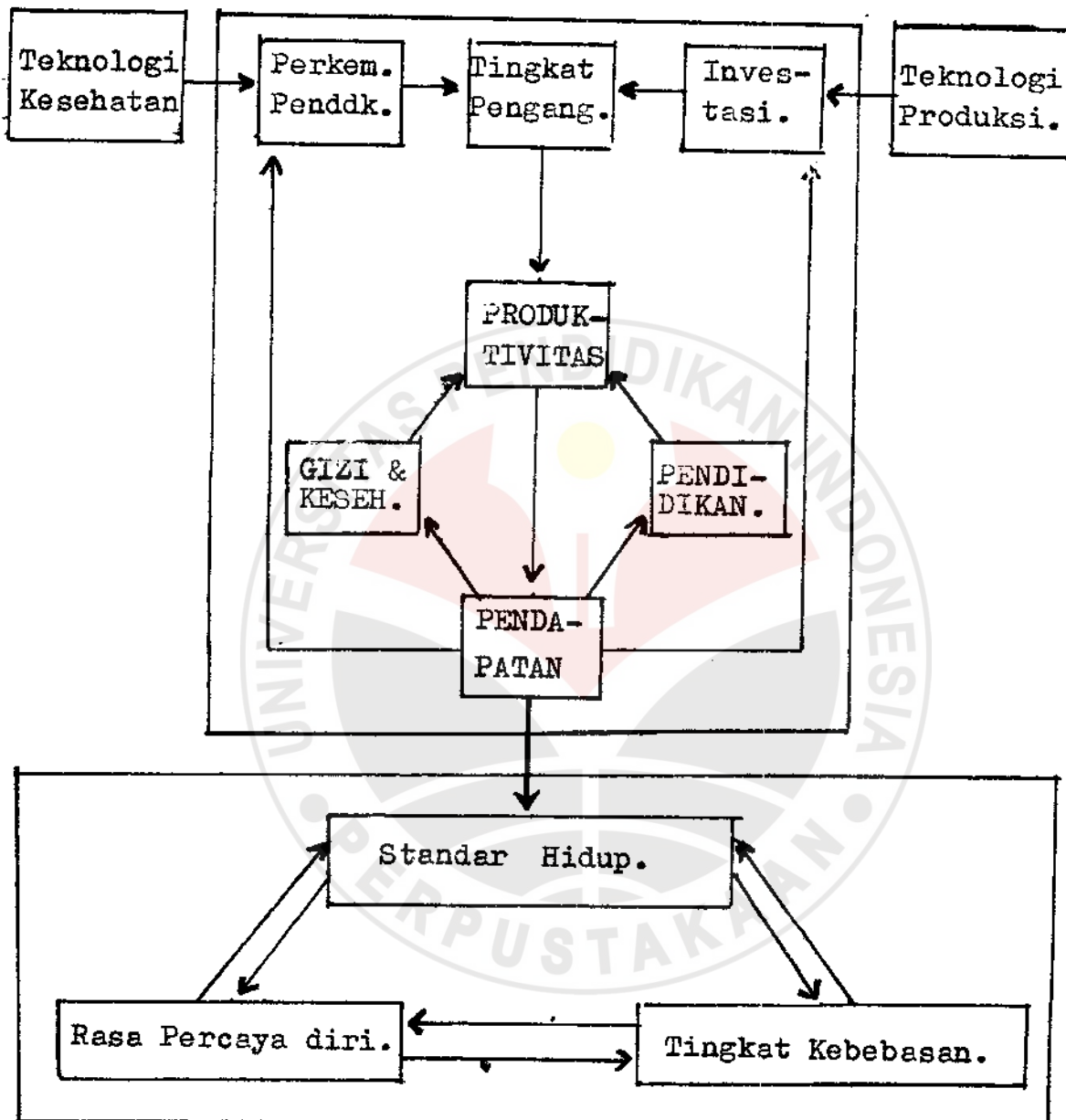
tasi, kesempatan kerja, tingkat pengangguran, standar hidup, rasa percaya diri dan tingkat kebebasan diri. Menurut Todaro tingkat pendidikan akan mempengaruhi keterampilan kerja dan kemampuan ketatalaksanaan, sedangkan faktor gizi dan kesehatan akan mempengaruhi daya kerja, penampilan kerja, ketepatan waktu, disiplin diri dan pengembangan diri.

Mengacu pada paradigma Todaro tersebut, promovendus makin menyadari betapa strategisnya faktor pendidikan dalam membangun suatu bangsa. Tetapi faktor pendidikan saja tampaknya belum mencukupi masih diperlukan faktor pendukung lain yang sama pentingnya yaitu upaya peningkatan gizi dan kesehatan.

Atas dasar itu semua, maka penelitian ini mengambil obyek koperasi peternakan sapi perah, dengan pertimbangan :

- (1). Bahwa lembaga koperasi bagi bangsa kita bukan sekedar lembaga ekonomi dan sosial saja tapi merupakan lembaga pendidikan non-formal sepanjang hayat.
- (2). Koperasi peternakan sapi perah perlu dikembangkan secara maksimal sebab akan mendukung upaya pendidikan dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan perkembangan bangsa secara keseluruhan.

GAMBAR 1.
PARADIGMA MULTI DIMENSI SALING PENGARUH ANTARA
FAKTOR EKONOMI DAN FAKTOR NON EKONOMI.



Sumber : Diadaptasi dari Michael P. Todaro pada Economic Development in the Third World, 1978, halaman 65.

2. Ruang Lingkup Masalah.

Koperasi Indonesia karena latar belakang sejarahnya dan bumi tempat berpijaknya dalam beberapa hal memiliki kekhasan-kekhasan tertentu yang berbeda dengan koperasi di negara asalnya (Eropa Barat). Mengingat itu semua maka ruang lingkup masalah yang dihadapi koperasi Indonesia itu akan bersifat khas pula.

Walaupun begitu, ruang lingkup masalah koperasi Indonesia itu umumnya akan berkisar pada empat permasalahan pokok sebagai berikut :

- 2.1. Koperasi Sebagai Bangun Perusahaan.
- 2.2. Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Swadaya.
- 2.3. Koperasi Sebagai Lembaga Pendidikan.
- 2.4. Koperasi Sebagai Wahana Pembangunan.

Dalam penelitian ini meskipun fokus penelitian tertuju pada segi anggotanya dengan unit analisis tingkat individu tapi keterkaitan dengan keempat masalah pokok itu tetap akan ada.

2.1. Koperasi Sebagai Bangun Perusahaan (Badan Usaha).

Koperasi adalah sebagai salah satu bentuk Bangun Perusahaan yang hidup dalam suasana pasar bebas. "Koperasi tak lebih dan tak kurang adalah pelaku ekonomi dalam pasaran. Dalam pasaran ia tidak berbeda dengan pelaku-pelaku ekonomi lain, dan kelangsungan hidupnya harus tunduk kepada hukum survival perusahaan." (Herman Suwardi - 1985 : 4-5)

Sebagai badan usaha koperasi juga harus berusaha memperoleh keuntungan atau dalam istilah koperasi mencari Sisa Hasil Usaha (SHU). Besarnya SHU akan sangat ditentukan oleh efisiensi pengelolaan perusahaan, volume usaha dan partisipasi para anggotanya.

Efisiensi perusahaan bukan hanya ditentukan oleh faktor-faktor personalianya saja tapi juga akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, diantaranya :

- a. Faktor lingkungan dimana koperasi berada.
- b. Faktor volume usaha yang dikelola oleh koperasi.
- c. Faktor struktur organisasi tersebut.
- d. Faktor pejabat pembina koperasi.
- e. Faktor pengusaha swasta saingan koperasi.
- f. Dan lain-lain.

Dalam penelitian ini tidak semua faktor tersebut di atas akan diungkapkan, tetapi yang akan menjadi fokus utama penelitian berkenaan dengan faktor-faktor intern manajemen koperasi itu sendiri yang meliputi faktor anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksanya. Dari ketiga komponen manajemen koperasi itu, dua komponen akan diteliti lebih intensip yaitu komponen anggota dan pengurus.

Dalam koperasi komponen anggota itu memegang posisi yang amat penting. Sebab sesungguhnya koperasi itu adalah milik anggota sehingga sering dikatakan, koperasi itu dari, oleh, dengan dan untuk anggota. Melalui rapat anggota, anggota bertugas menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Ru -

mah Tangga, Program Kerja dan Rencana Anggaran koperasi. Sendi dasar koperasi kita menyatakan : "Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi." (Undang-undang koperasi, no : 12/67 pasal 6 ayat 2).

Pengurus adalah mandataris anggota yang bertugas untuk melaksanakan kemauan anggota yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja Koperasi. Efektivitas pelaksanaan tugas itu akan sangat bergantung pada kualitas pengurus itu sendiri. Undang-undang koperasi kita (no : 12/67 pasal 22 (2) a) menetapkan dua syarat utama bagi pengurus koperasi yaitu sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Setelah fungsi anggota dilaksanakan (menyusun AD, ART dan Program Kerja) maka kini yang akan menentukan keberhasilan koperasi adalah pengurusnya. Tugas pengurus akan sangat luas, yaitu memimpin usaha-usaha koperasi, melatih karyawan, mendidik anggota, memelihara hubungan baik/kerjasama dengan pemerintah/swasta serta memupuk kekentalan solidaritas para anggotanya. Makin luas usaha koperasi dan makin banyak anggotanya menuntut kualitas pengurus yang makin tinggi pula.

Fungsi badan pemeriksapun sebenarnya tak kurang pentingnya tapi karena tugasnya relatif sempit yaitu hanya dalam pemeriksaan (UU. koperasi no. 12/67 pasal 28) dan tidak sampai punya kewenangan untuk memilih dan memberhentikan pengurus maka peranannya dalam koperasi tidak akan begitu besar.

Melalui penelitian ini koperasi sebagai badan usaha terutama akan diukur dari kemampuan koperasi untuk berkembang (tambah anggota, produksi, penjualan dan lain - lain) dan kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU baik SHU dalam arti kuantitatif mutlak (dalam rupiah) atau SHU dalam arti kuantitatif relatif (prosentase dari modal yang digunakan).

Perkembangan koperasi tersebut secara konseptual adalah sebagai hasil dari adanya partisipasi anggota, baik dalam partisipasi pengambilan keputusan, modal, usaha maupun pengawasan. Anggota akan berpartisipasi karena mereka merasakan manfaat koperasi. Koperasi akan banyak memberi manfaat kepada anggota bila dikelola secara efisien oleh pengelola (pengurus) yang cukup cakap dan bertanggung jawab.

2.2. Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Swadaya.

Organisasi ekonomi swadaya yaitu organisasi ekonomi yang didasarkan kepada kekuatan atau usaha sendiri baik kekuatan yang bersifat mental psikologis maupun kekuatan yang bersifat fisik-material. Secara mental psikologis organisasi ekonomi swadaya itu hendaknya mampu mengelola organisasi secara efektif efisien dan mandiri, secara fisik-material walau bertahap hendaknya mampu membiayai organisasinya itu sehingga ketergantungan kepada pihak luar sedikit-demi sedikit dapat dikurangi.

Undang-undang Koperasi Nomor 12/1967 pasal 6 ayat (7)

menyebutkan bahwa : "Swadaya, swakerta dan swasembada se-
bagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada
diri sendiri".

Koperasi sebagai organisasi ekonomi swadaya masih se-
dang diupayakan perwujudannya melalui upaya pembinaan ko-
operasi bertahap sejak tahap ofisialisasi, de-ofisialisasi
dan tahap otonomi. Peningkatan dari satu tahap pembinaan
ke tahap pembinaan yang lainnya itu tergantung dari per-
kembangan keswadayaan dari masing-masing koperasi. Kope-
rasi yang telah mencapai tingkat swadaya penuh akan dibi-
na secara otonom dimana pemerintah hanya berfungsi pembi-
naan, pengawasan dan pemberian legalitas hukum saja.

Koperasi yang telah mandiri atau yang memiliki sema-
ngat swadaya yang tinggi adalah merupakan cita-cita Peme-
rintah dan gerakan koperasi. Inpres Nomor 4/1984 sebagai
penyempurnaan dari Inpres Nomor 2/1978 menyatakan dalam
lampirannya (pasal 2 a) :

Memantapkan dan menumbuhkan swadaya KUD, sehingga
mampu menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian
pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri untuk
keperluan mereka dan warga pedesaan.

Swadaya koperasi yang merupakan perwujudan dari ada-
nya semangat swadaya para anggotanya merupakan daya hi-
dup koperasi dalam arti yang sebenar-benarnya sebab lan-
dasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan
kesadaran berpribadi (UU Koperasi Nomor 12/1967 pasal 2
ayat 3).

Melalui penelitian ini akan diungkapkan : "Apakah semangat swadaya itu ada di KPBS Pangalengan ? Apakah semangat swadaya itu dimiliki oleh sebagian besar warganya atau hanya dimiliki oleh para pemimpinnya saja ? Apakah perkembangan KPBS yang pesat ini sebagai hasil dari adanya semangat swadaya para warganya atau karena faktor lain ?

Keswadayaan koperasi itu bisa dilihat dari tingkat partisipasi para anggotanya. Makin besar partisipasi anggota berarti makin tinggi derajat penampilan jiwa swadaya para anggota tersebut. Partisipasi merupakan manifestasi dari rasa percaya terhadap diri sendiri, terhadap koperasi, Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi.

2.3. Koperasi Sebagai Lembaga Pendidikan.

Pada umumnya para ahli mengakui bahwa koperasi merupakan wadah golongan ekonomi lemah baik lemah secara mental psikologis maupun lemah dalam arti fisik-material. Juga sering dikatakan bahwa koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan uang. Ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat menjadi wahana bagi kaum lemah supaya menjadi lebih kuat baik secara mental psikologis maupun secara fisik material. Kalau demikian maka fungsi koperasi itu bukan semata-mata ekonomi (memerangi kemiskinan) tapi juga punya fungsi pendidikan (memerangi kebodohan). Itulah sebabnya mengapa Para Perintis Koperasi Rochdale di Inggris (1844) mencantumkan sebagai salah sa

tu prinsip koperasi adalah : "providing for the education of the members in Cooperative principles". (E.D. Damanik, 1981 : 3), prinsip itu oleh Komisi yang ditugaskan untuk menentukan tentang sendi-sendi dasar koperasi (Komisi ini dibentuk oleh International Cooperative Alliance) pada tahun 1937 dirumuskan bahwa salah satu prinsip koperasi adalah : "promotion of education". (E.D. Damanik, 1981 : 10). Dalam Undang-undang Koperasi Nomor 12/1967 prinsip ini dicantumkan secara implisit dalam sendi dasar koperasi Indonesia yang ke (5) : "Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya". (Undang-undang Koperasi Nomor 12/1967 pasal 6 ayat 5). Fungsi pendidikan dalam sendi dasar koperasi Indonesia berdasarkan UU.Koperasi No.: 12/1967 secara implisit dimasukkan dalam konsep kesejahteraan, sebab kesejahteraan itu bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan fisik material tapi juga ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat mental spiritual. Dalam Undang-undang No.: 79/1958 pasal 2 ayat (1) C2 salah satu usaha koperasi itu adalah : "Mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi". Dalam Undang-undang ini fungsi pendidikan dalam koperasi Indonesia dinyatakan secara eksplisit.

Koperasi yang memperhatikan fungsi pendidikan ini berarti telah berusaha meningkatkan daya hidup koperasi yaitu koperasi sebagai organisasi ekonomi swadaya.

Melalui penelitian ini akan diungkapkan :

- a. Apakah ada pengaruh faktor pendidikan terhadap partisipasi para anggota ?
- b. Apakah fungsi pendidikan ini telah dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan ?
- c. Apakah kemajuan fisik-material yang telah dicapai oleh koperasi yang diteliti ini sebagian merupakan hasil pelaksanaan fungsi pendidikan tersebut ?

Fungsi pendidikan ini dalam koperasi dapat dilakukan dalam berbagai cara dan dengan materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan warga koperasi itu sendiri.

2.4. Koperasi Sebagai Wahana Pembangunan.

Koperasi bagi negara-negara sedang berkembang bukan semata-mata sebagai wadah perbaikan hidup para anggotanya sendiri tapi juga sebagai wahana pembangunan. Dalam konsep yang pertama (the Western concept of cooperation) koperasi semata-mata merupakan milik atau untuk kepentingan perorangan atau para anggotanya semata (efek langsung) seperti peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, perbaikan posisi sosial ekonomi golongan ekonomi lemah, perlindungan diri dari eksploitasi golongan ekonomi kuat dan lain-lain. Menurut konsep "Western", meskipun para koperasiawan seolah-olah hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi sebenarnya secara tidak langsung mereka akan memberi sumbangan kepada peningkatan pembangunan negara pada umumnya diantaranya dengan jalan meningkatkan

kondisi sosial ekonomi para produsen dan konsumen kecil (yang jumlahnya sangat besar) dan juga koperasi akan menjadi alat pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata melalui jaminan harga yang wajar dan menguntungkan bagi para produsen dan konsumen kecil (Hans-H. Munker, 1983 : 17-18).

Negara-negara sedang berkembang pada umumnya menganut konsep koperasi dari golongan sosialis (the socialist concept of cooperation), menurut konsep ini pengembangan koperasi perlu dirancang dan dikendalikan oleh Pemerintah serta menjadikan koperasi sebagai wahana untuk mensukseskan rencana pembangunan Pemerintah yang bersangkutan. Karena konsep ini yang digunakan maka seringkali terjadi para pejabat koperasi bertindak terlalu jauh sehingga bersifat campur tangan dalam mengurus intern koperasi, yang efek negatifnya : sebagian besar anggota koperasi menjadi pasif, koperasi seolah-olah menjadi jawatan Pemerintah, perkembangan koperasi sangat tergantung dari fasilitas Pemerintah, koperasi menjadi terlalu dependen terhadap pembinanya sehingga kemandirian koperasi sebagai organisasi ekonomi swadaya menjadi sirna. Yang harus diupayakan tentunya agar dengan adanya bantuan perencanaan serta pengendalian Pemerintah itu koperasi sebagai organisasi ekonomi swadaya dapat berkembang lebih cepat lagi. Tidak bisa disangkal, mengingat kondisi sosial ekonomi dan budaya sebagian besar warga negaranya relatif masih

rendah maka inisiatif dan bantuan Pemerintah untuk menun
buhkan koperasi sangat diperlukan.

Setelah Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan maka sesuai dengan amanat "Bangsa" seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maka fungsi koperasi Indonesia itu juga tidak hanya untuk kepentingan anggota tapi telah ditambah : "towards safeguarding and re-enfor-
cing the very goal of Independence itself, hence not me-
rely enhancing membership's interests alone". (Ibnoe Soe
diono, 1983 : 8).

Ditinjau secara makro yaitu melalui konsep koperasi sebagai wahana pembangunan koperasi mempunyai fungsi se-
bagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi khususnya produksi pangan (da-
lam penelitian ini produksi susu).
- b. Menjamin tercapainya salah satu dari Trilogi Pembangu-
nan yaitu : "Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil-
nya".
- c. Meningkatkan kesempatan kerja.
- d. Melindungi golongan ekonomi lemah dari penghisapan
dan penguasaan golongan ekonomi kuat.
- e. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara
mental spiritual maupun fisik material.

Penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui sampai
seberapa jauh atau besar tujuan-tujuan makro ini telah
tercapai di KPBS, baik dalam arti kuantitatif maupun kua-
litatif.

3. Masalah Yang Diteliti.

3.1. Penjelasan Masalah.

Yang merupakan masalah utama dalam penelitian ini adalah pertanyaan : Apa sebenarnya yang merupakan daya hidup dari suatu koperasi bila dilihat dari segi anggotanya ? Mengapa suatu koperasi mampu bertahan hidup dan berkembang ? Mengapa koperasi lainnya mati atau hidup merana ? Adakah hubungan antara daya hidup koperasi dengan partisipasi para anggotanya ? Bagaimana hubungan antara daya hidup koperasi dengan kesejahteraan para anggotanya ? Apakah perkembangan suatu koperasi diikuti pula oleh perkembangan anggotanya secara proporsional ? Sebagai tambahan siapa sebenarnya dewasa ini yang mempunyai peranan utama dalam pengembangan suatu koperasi ? Anggotakah ? Pengurusakah ? Badan Pemeriksakah ? Pembina nyanakah ? atau lainnya ?

Jadi yang merupakan pertanyaan pokok atau yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Dilihat dari segi anggotanya, mengapa anggota koperasi aktif mendukung koperasi atau dengan istilah lain: "Adakah dan mengapa anggota berpartisipasi ?"
- b. Dengan adanya partisipasi anggota tersebut : "Apakah kesejahteraan anggota meningkat" ?
- c. Adakah kaitan antara partisipasi dengan perkembangan koperasi ?

Pertanyaan pokok yang pertama perlu tambahan ketera-

ngan bahwa yang hendak diteliti promovendus adalah faktor-faktor internal anggota yang menyebabkan mereka mau dan mampu berpartisipasi dalam koperasi.

Pertanyaan pokok yang kedua perlu dijelaskan sebab mungkin akan terjadi :

- 1). Ada partisipasi yang tidak/kurang mempengaruhi kesejahteraan para anggotanya misalnya pada partisipasi anggota-anggota KUD yang akan memperoleh pelayanan yang sama dengan yang bukan anggota KUD.
- 2). Koperasi dapat berkembang dengan pesat tapi perkembangannya itu sama sekali tidak disertai dengan perkembangan kesejahteraan para anggotanya secara langsung. Koperasi yang seperti itu belum menjadi koperasi yang sebenarnya sebab ukuran utama perkembangan suatu koperasi adalah "perkembangan" kesejahteraan para anggotanya sendiri. Meskipun koperasi dijadikan sebagai wahana untuk mensukseskan program pembangunan Pemerintah, tapi tak berarti bahwa kepentingan anggota itu diabaikan. "The role of cooperatives according to the new Law is basically two fold, namely to increase the welfare of members and the community, and to simultaneously bring about economic development." (Ibnoe Soedjono, 1983 : 10).

3.2. Pembatasan Masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada dua pertanyaan pokok penelitian seperti telah dikemukakan pada 3.1. terse

but di atas.

Pertanyaan pokok penelitian yang pertama : Apakah yang menjadi daya hidup koperasi ? Dengan perkataan lain mengapa anggota berpartisipasi dalam koperasi.

Daya hidup ini bisa bersifat mental spiritual dan fisik material. Daya hidup yang bersifat mental spiritual berkisar pada semangat, ide, keyakinan dan kemampuan mental yang mendorong para warga koperasi untuk mengadakan kerjasama hingga tujuan-tujuan mereka baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang tercapai.

Rockeach (Rockeach, Milton, 1980 : 11) menjelaskan bahwa keyakinan seseorang itu terbentuk pada masa kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara anak dan orang tuanya (orang dewasa yang ada disekitarnya) dan sistim keyakinan total seseorang sebagai suatu organisasi keyakinan akan berbeda-beda tingkat kedalamannya tergantung dari pengalaman hidupnya di alam dan masyarakat serta stabilitas lingkungan fisik dan sosial dimana ia berada.

Dilihat dari segi kelembagaan, anggota akan berpartisipasi dalam koperasi adalah karena mereka percaya pada koperasi. Dilihat dari segi manajemennya, anggota akan berpartisipasi karena mereka percaya kepada Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi yang bersangkutan. Tingkat kepercayaan terhadap Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi ini tergantung dari persepsi anggota kepada mereka, yaitu apakah mereka itu : jujur, mampu, memperhatikan kepen

tingannya dan lain-lain ?

Keyakinan seseorang terhadap organisasi koperasi di- mana ia menjadi warganya juga akan banyak tergantung da- ri pengalaman-pengalaman dia dengan koperasi sebelumnya hingga sekarang. Pengalaman anggota baik secara kuantitatif maupun kualitatif menghasilkan anggota yang memaha- mi koperasi dan trampil berkoperasi.

Penelitian ini juga akan membatasi diri pada pengung- kapan apakah partisipasi anggota secara proporsional da- pat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan ang- gota akan diukur dari :

- a). Segi material seperti perolehan SHU dan pendapatan lain dari koperasi.
- b). Non material seperti perasaan aman karena adanya ja- minan pasar, jaminan harga, jaminan input produksi dan lain-lain.

Perkembangan koperasi yang akan dianalisis adalah yang berkaitan dengan perkembangan yang bersifat materi- al seperti perkembangan : anggota, pemasaran produksi, SHU dan lain-lain.

4. Tujuan Penelitian.

4.1. Tujuan Utama Penelitian :

- 4.1.1. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang merupa- kan daya hidup suatu koperasi Indonesia da - lam hal ini Koperasi Peternakan Bandung Sela- tan (KPBS) di Pangalengan Kabupaten Bandung

bila dilihat dari segi **internalnya sehingga** KPBS mampu berkembang dengan pesat seperti yang telah terjadi selama ini.

- 4.1.2. Ingin mengetahui hubungan antara daya hidup koperasi dengan tingkat partisipasi para anggotanya. Adakah hubungan itu ? Kalau ada bagaimana tingkat keeratannya ?
- 4.1.3. Ingin mengetahui tingkat kesejahteraan anggota dibandingkan dengan tingkat partisipasinya.
- 4.1.4. Ingin mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan KPBS dalam memajukan KPBS.

4.2. Tujuan Tambahan Penelitian.

- 4.2.1. Untuk mengetahui perkembangan KPBS dalam :
 - a. Bidang organisasi dan manajemen.
 - b. Bidang Perusahaan (usaha).
 - c. Bidang Permodalan.
 - d. Bidang perolehan Sisa Hasil Usaha.Perkembangan koperasi tersebut secara konvensional merupakan akibat dari adanya partisipasi anggota yang tinggi.
- 4.2.2. Untuk mengetahui hasil perkembangan kebijaksanaan makro di KPBS dalam :
 - a. Bidang produksi susu.
 - b. Bidang distribusi pendapatan.
 - c. Bidang perluasan kesempatan kerja.
 - d. Bidang pendidikan dan latihan.

5. Pentingnya Penelitian.

Penelitian ini penting karena :

- 5.1. Penelitian dengan fokus untuk mengetahui daya hidup koperasi pada koperasi susu (peternakan) di Bandung Selatan ini belum pernah dilakukan , padahal masalahnya amat prinsipil.
- 5.2. Daya hidup koperasi merupakan jiwanya koperasi yang menyebabkan koperasi bisa bertahan hidup dan mampu berkembang. Dengan diketahuinya daya ini serta karakteristik-karakteristiknya, maka akan memudahkan usaha pembinaan koperasi seti - dak-tidaknya untuk koperasi sejenis.
- 5.3. Dalam rangka peningkatan kualitas bangsa maka usaha untuk memperbesar produksi protein hewani sangatlah penting. Susu merupakan sumber protein hewani yang masih langka dan harganya masih re- latif mahal. Bila usaha pengembangan koperasi susu ini berhasil dengan jumlah produksi yang mencukupi kebutuhan serta dengan kualitas susu yang memadai maka diharapkan harga-harga makan- an yang mempergunakan komponen susu dapat ditu- runkan sehingga dapat terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ini berarti koperasi su- su dapat membantu meningkatkan perbaikan gizi rakyat dimana selanjutnya perbaikan gizi ini a- kan membantu meningkatkan kesehatan rakyat ser-

ta produktivitas rakyat (Todaro, 1978 : 65).

- 5.4. Sebagian besar kebutuhan susu di Indonesia masih diimpor dari berbagai negara dan ini berarti menghabiskan banyak devisa. Dengan majunya kope_rasi susu di Indonesia, maka impor susu bisa di_kurangi atau dihentikan sama sekali sehingga de_visa yang tadinya digunakan untuk mengimpor su_su bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang lain yang penting dan belum bisa diproduksi di Indonesia.
- 5.5. Koperasi peternakan susu rakyat dalam kasus ini KPBS merupakan perkumpulan petani-petani kecil dengan jumlah ternak per anggota keluarga berk_isar antara 2-5 ekor sapi. Dewasa ini KPBS ber₋anggotakan sebanyak 5.474 orang peternak dengan melibatkan sekitar 7.255 orang tenaga kerja tam_bahan (Data KPBS 1984). Koperasi itu sendiri me_nyerap sebanyak 185 orang karyawan dan 4 (empat) orang diantaranya tenaga sarjana. Jelas kiranya bahwa koperasi peternakan sapi perah ini perlu terus dikembangkan melalui berbagai usaha anta₋ra lain melalui penelitian-penelitian ilmiah, sebab eksistensinya itu bukan sekedar memberi manfaat kepada para anggotanya sendiri, tapi ju_ga dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas (menyediakan protein hewani, memperluas kesempa

tan kerja, menyediakan pupuk, meningkatkan investasi) dan juga kepada negara (menghemat devisa, meningkatkan kesehatan rakyat, meningkatkan ketahanan nasional, pendistribusian pendapatan yang lebih merata dan juga bisa meningkatkan gengsi negara).

Dari kelima alasan pokok tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa penelitian koperasi dewasa ini khususnya koperasi peternakan dan susu sangatlah penting untuk dilakukan secara intensif dengan harapan dapat digali penemuan penemuan baru untuk memperkaya kajian bidang perkoperasi-an dan dapat digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan baru dalam pembinaan dan pengembangan koperasi Indonesia.

6. Asumsi Dasar Studi.

Seperti akan dikemukakan pada Bab II bahwa salah satu ciri koperasi yang "benar" adalah adanya peran aktif anggota dalam koperasi atau dalam studi ini diberi istilah Partisipasi. (G.H. Powell, Emelianoff, Frank Robotka, Richard Phillips, H. Muenkner, M. Amin Aziz). Masalahnya sekarang, mengapa anggota berpartisipasi dalam koperasi? Amitai Etzioni (1961) menjelaskan bahwa ada tiga jenis partisipasi yaitu partisipasi : alinatif, kalkulatif dan moral. Menurut M.Amin Aziz (1982) bahwa partisipasi yang terjadi pada masyarakat koperasi Indonesia, merupakan a-duk-an dari ketiga jenis partisipasi seperti dikemukakan oleh Etzioni tersebut. Partisipasi warga koperasi di

KPBS juga tampaknya merupakan adukan dari ketiga jenis partisipasi itu. Mereka berpartisipasi secara alinatif karena dipaksa oleh keadaan misalnya, agar bisa memasarkan produknya melalui koperasi, agar bisa memperoleh kredit lebih besar lagi, agar bisa memperoleh kredit kebutuhan pokok dan lain-lain. Secara kalkulatif mereka juga sudah memperhitungkan **untung ruginya berpartisipasi dalam koperasi**. Perhitungan mereka tampaknya cukup tepat sebab dengan berpartisipasi secara aktif dalam koperasi misalnya mereka dapat memperoleh harga yang menguntungkan dari produknya. Selain dari kedua jenis partisipasi itu warga KPBS juga sebenarnya melakukan partisipasi moral karena partisipasi mereka itu didasari pula oleh komitmen komitmen diantara mereka (anggota, pengurus, Pemerintah) serta mungkin karena adanya kesadaran. Dalam studi ini promovendus tidak akan meneliti bobot masing-masing jenis partisipasi tadi hanya ingin memperkuat pendapat M. Amin Aziz dengan berasumsi bahwa partisipasi anggota KPBS juga akan merupakan adukan dari partisipasi alinatif, kalkulatif dan moral.

Promovendus berasumsi bahwa anggota akan mampu berpartisipasi bila mereka memiliki kemampuan-kemampuan sebagai anggota baik kemampuan yang bersifat mental-spiritual maupun yang bersifat fisik material.

Kemampuan yang bersifat mental spiritual yang akan mempengaruhi partisipasi adalah :

- 6.1. Persepsi yaitu persepsi anggota terhadap koperasi sebagai lembaga, terhadap pengurus sebagai pengelola dan terhadap badan pemeriksa sebagai pengawas atau sebagai kepercayaan anggota. (Ace Partadiredja, 1969 : 17).
- 6.2. Pengetahuan umum anggota yang sebagian dari padanya diperoleh pada pendidikan formal mereka sejak di tingkat Sekolah Dasar hingga di Perguruan Tinggi.
- 6.3. Mentalitas anggota baik mentalitas solidaritas atau mentalitas kemandirian. Undang-undang Koperasi No. : 12/1967 menyatakan bahwa : "Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi."

Kemampuan yang bersifat fisik-material yang akan mempengaruhi partisipasi adalah pemilikan, yang dalam studi ini dan yang diasumsikan besar pengaruhnya adalah pemilikan sapi perah sebagai faktor produksi utama anggota KPBS dan pemilikan tanah sebagai faktor produksi yang bisa mendukung usaha peternakan.

Keempat kemampuan itu, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material dalam studi ini dijadikan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat sendang variabel terikatnya adalah partisipasi itu sendiri.

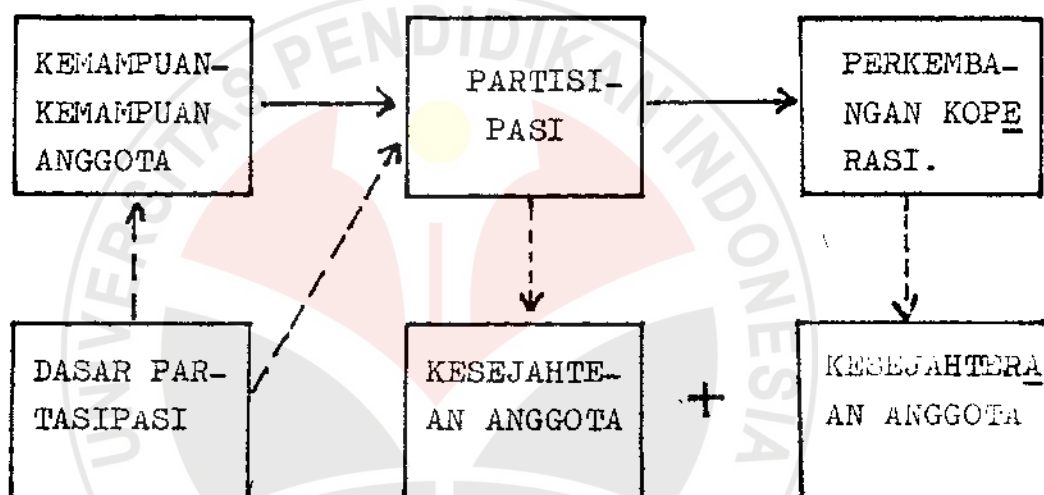
Hasil dari adanya partisipasi tadi adalah :

- a. Koperasi sebagai lembaga akan berkembang.

b. Anggota sebagai individu akan memperoleh kesejahteraan.

Bila digambarkan dalam sebuah model, model penelitian ini adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.
MODEL PENELITIAN



7. Pengertian Istilah.

Untuk menghindari salah pengertian maka beberapa istilah tersebut di bawah ini kiranya perlu dijelaskan, yaitu :

- 7.1. Koperasi.
- 7.2. Daya hidup koperasi.
- 7.3. Kesejahteraan anggota koperasi
- 7.4. Organisasi ekonomi.
- 7.5. Swadaya.

7.1. Koperasi adalah : "Organisasi ekonomi swadaya, berdasarkan Pancasila, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bekerjasama menjalankan satu atau lebih kegiatan ekonomi dan secara terus-menerus melaksanakan pendidikan anggota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya."

7.2. Daya hidup koperasi : yaitu daya atau kekuatan yang menyebabkan koperasi mampu bertahan hidup dan mampu pula mengembangkan dirinya secara wajar di dalam sistim ekonomi pasar yang bersifat persaingan (competitive). Secara substantif kejiwaan, daya hidup koperasi itu adalah berupa semangat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kekuatan sendiri (dalam hal ini kekuatan mental psikologis dan fisik material para anggotanya).

7.3. Kesejahteraan anggota : Tingkat kepuasan anggota karena :

7.3.1. Ia memperoleh pendapatan dari koperasi.

7.3.2. Ia memperoleh pelayanan dari koperasi (pemasaran , harga, barang kebutuhan ternak, kredit sapi, kesehatan ternak, santunan dan lain-lain).

7.3.3. Ia bisa berkomunikasi dengan anggota-anggota koperasi lainnya.

7.3.4. Ia bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari koperasi.

7.3.5. Faktor perolehan lain dari koperasi.

7.4. Organisasi ekonomi : organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau Sisa Hasil Usaha. Koperasi adalah organisasi ekonomi pula sehingga perlu mencari SHU (keuntungan) hanya perlu ditegaskan bahwa dalam upaya memperoleh SHU tersebut dalam operasinya koperasi akan berusaha meminimalkan ongkos dibandingkan dengan usaha untuk memaksimalkan laba.

7.5. Swadaya : Swa berarti milik sendiri dan daya artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Swadaya = kekuatan atau usaha sendiri (penjelasan pasal 6 ayat (7) Undang - undang Koperasi No. 12/1967).

Organisasi ekonomi swadaya adalah organisasi ekonomi yang didasarkan kepada kekuatan atau usaha sendiri baik kekuatan yang bersifat mental spiritual (manajemen) maupun yang bersifat fisik material (permodalan dan lain - lain).

8. Sistimatika Laporan.

Lanjutan dari bagian Pendahuluan ini secara berturut-turut akan disampaikan :

8.1. Tinjauan Literatur Koperasi, akan disajikan pada Bab II dalam disertasi ini.

8.2. Prosedur Penelitian dan Penjelasan dari Variabel-Va-

riabel Penelitian yang akan dianalisis, disajikan pada Bab III.

8.3. Temuan Penelitian dan Analisis Penelitian disajikan pada Bab IV.

8.4. Sebagai bagian akhir dari laporan ini akan disampaikan : Rangkuman, Kesimpulan dan Rekomendasi yang akan disajikan pada Bab V.

